

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KECAKAPAN
HIDUP OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN PEMUDA DI KOTA
SAMARINDA**

Novalin Delvia Sari, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Keterampilan Pemuda di Kota Samarinda.

Pengarang : Novalin Delvia Sari

NIM : 2202016057

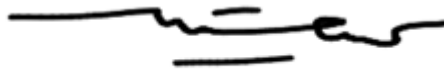
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Juli 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 195903081984032001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 14
Nomor	: 1
Tahun	: 2026
Halaman	: 186-195

IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN PEMUDA DI KOTA SAMARINDA

Novalin Delvia Sari ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Pengembangan keterampilan pemuda melalui program pelatihan kecakapan hidup merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini mengkaji implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda serta faktor penghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian model kesesuaian implementasi program David C. Korten, meliputi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, program dengan organisasi pelaksana, dan kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari wawancara bersama pihak dinas, mitra kerja, dan peserta program. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup di Kota Samarinda telah berjalan cukup baik. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat terlihat dari relevansi materi pelatihan, seperti personal branding dan digital marketing yang sesuai dengan kebutuhan pemuda. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana tercermin dari pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, event organizer, dan pemerintah kecamatan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana terlihat dari kemudahan persyaratan peserta dan respon positif peserta terhadap pelaksanaan pelatihan, meskipun terdapat kendala pada sistem pendaftaran digital. Faktor penghambat implementasi program meliputi keterbatasan anggaran yang membatasi kapasitas program, kurang optimalnya koordinasi dan dukungan fasilitas antar lembaga, minimnya tindak lanjut dan pendampingan pasca pelatihan. Sehingga diperlukan penguatan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan program agar manfaat pelatihan dapat dirasakan lebih optimal oleh pemuda.

Kata Kunci : Implementasi Program, Pelatihan Kecakapan Hidup, Keterampilan Pemuda

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: novalin.delvia@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Perubahan global yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, transformasi ekonomi, dan dinamika sosial pada era revolusi industri 4.0 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam kondisi ini, pemerintah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada layanan administratif, tetapi juga menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui program pelatihan kecakapan hidup (*life skills*) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta daya saing pemuda dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional karena berada pada usia produktif dan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun. Dalam konteks pembangunan daerah, kelompok ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi sosial. Namun demikian, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya keterampilan kerja, keterbatasan pengalaman, serta ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah pemuda di Provinsi Kalimantan Timur mencapai sekitar 1.108.400 jiwa, dengan Kota Samarinda menyumbang 214.674 jiwa atau sekitar 19,37% dari total pemuda di provinsi tersebut. Besarnya jumlah pemuda ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki potensi demografis yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang optimal. Hal ini tercermin dari masih adanya kesenjangan dalam penyerapan tenaga kerja muda di daerah tersebut.

Secara empiris, permasalahan ketenagakerjaan di Kota Samarinda masih menunjukkan tantangan yang cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2022, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 28.750 jiwa, dengan 16.198 jiwa di antaranya berasal dari kelompok usia pemuda (16–30 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 56,4% dari total pengangguran di Kota Samarinda merupakan kalangan muda. Meskipun data terbaru mengenai pengangguran berdasarkan kelompok usia tidak tersedia, temuan tersebut tetap relevan dalam menggambarkan adanya permasalahan struktural yang dihadapi pemuda dalam memasuki dunia kerja.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dalam bentuk program pemberdayaan pemuda. Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah daerah adalah melalui Program Pelatihan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dirancang untuk memberikan berbagai keterampilan praktis seperti digital marketing, personal branding, kewirausahaan, serta keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Melalui program ini, diharapkan pemuda dapat meningkatkan kapasitas diri serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, implementasi program di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan hasil temuan awal, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, tingginya minat peserta yang tidak sebanding dengan kapasitas program, serta belum optimalnya pendampingan pascapelatihan. Selain itu, koordinasi antar pelaksana program juga masih menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, apa saja faktor penghambat implementasinya, serta bagaimana kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dalam pelaksanaannya.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau aktor publik untuk mengatasi permasalahan masyarakat serta mengarahkan tindakan tertentu dalam kehidupan sosial. Dye dalam Indiahono (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Agustino (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan nyata di lapangan. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan yang mengatur tujuan serta cara pencapaiannya. Grindle dalam Winarno (2014) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup proses

koordinasi, interpretasi, dan pelaksanaan oleh aktor-aktor kebijakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif.

Implementasi Program

Implementasi program merupakan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kebijakan. Arikunto dalam Nuraeni dkk. (2022) menyatakan bahwa implementasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jones dalam Rochman (2009) menjelaskan bahwa implementasi program merupakan proses interaktif antara tujuan dengan tindakan yang melibatkan pengorganisasian, interpretasi, dan pelaksanaan. Selain itu, Nawangsari (2023) menegaskan bahwa implementasi program merupakan aktivitas dinamis yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi program merupakan jembatan antara perencanaan kebijakan dan hasil nyata di lapangan.

Model Implementasi Program David C. Korten

Model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Korten menjelaskan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian antara tiga unsur utama implementasi program. Menurut Korten dalam Akib dan Tarigan (2008), ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat);
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana;
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dengan demikian, model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh tingkat keselarasan antara ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pelatihan Kecakapan Hidup

Pelatihan kecakapan hidup (*life skills training*) merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang bertujuan membekali individu dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri. UNICEF (2001) menyatakan bahwa pelatihan kecakapan hidup tidak hanya berfokus pada *survival skills*, tetapi juga pada penguatan adaptasi dan resiliensi terhadap perubahan sosial. Muhaimin dalam Mawardi (2012) menjelaskan bahwa kecakapan hidup

adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kehidupan secara wajar, kreatif, dan proaktif. Selain itu, Gunarso (2007) menekankan bahwa pelatihan kecakapan hidup berfungsi mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan kecakapan hidup berperan penting dalam meningkatkan kemampuan teknis, sosial, dan mental individu khususnya pemuda.

Keterampilan Pemuda

Keterampilan pemuda merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam rentang usia pemuda untuk beradaptasi, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun yang memiliki peran sebagai agen perubahan dan pembangunan. WHO (2024) menekankan bahwa pemuda membutuhkan pengembangan keterampilan yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial untuk menghadapi tantangan global. Keterampilan pemuda mencakup *hard skills* dan *soft skills* yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta kemandirian dalam dunia kerja. Dengan demikian, peningkatan keterampilan pemuda menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Analisis penelitian ini mengacu pada model kesesuaian implementasi program David C. Korten yang meliputi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan sumber data primer dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, pelaksana program, serta peserta pelatihan. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Keterampilan Pemuda di Kota Samarinda

1. Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara Program Pelatihan Kecakapan Hidup dengan pemanfaat (peserta pemuda) sudah cukup baik. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dirancang untuk menjawab kebutuhan pemuda dalam

meningkatkan keterampilan kerja, khususnya di bidang digital dan kewirausahaan. Materi pelatihan seperti digital marketing, personal branding, serta kesiapan memasuki dunia kerja dinilai relevan dengan kebutuhan pemuda di Kota Samarinda yang menghadapi tantangan kompetisi kerja dan transformasi digital.

Peserta pelatihan menyatakan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam meningkatkan kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap penggunaan media digital untuk pengembangan usaha maupun pencarian kerja. Selain itu, metode pelatihan yang bersifat praktik juga membuat peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh instruktur.

Meskipun demikian, terdapat beberapa peserta yang menilai bahwa durasi pelatihan masih relatif singkat sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pendalaman materi. Namun secara umum, program ini telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan wawasan dan keterampilan dasar pemuda.

2. *Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana*

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan perannya dalam mengimplementasikan program pelatihan kecakapan hidup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program didukung oleh pembagian tugas antara dinas, pihak penyelenggara kegiatan (*event organizer*), instruktur, serta pemerintah kecamatan sebagai mitra pelaksana di lapangan.

Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana pelatihan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam menyesuaikan jumlah peserta dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Hal ini menyebabkan adanya sistem kuota dalam setiap kelas pelatihan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, koordinasi antar organisasi pelaksana secara umum sudah berjalan, namun masih ditemukan kendala pada sinkronisasi teknis di lapangan, terutama terkait pengelolaan peserta dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur pelaksanaan sudah terbentuk dengan baik, masih diperlukan peningkatan koordinasi agar implementasi program berjalan lebih optimal.

3. *Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana secara umum sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kemudahan persyaratan peserta dalam mengikuti program pelatihan kecakapan hidup, di mana peserta dapat mendaftar melalui sistem yang

telah disediakan oleh penyelenggara, termasuk platform digital Go Sepakat Talent.

Partisipasi peserta dalam pelaksanaan pelatihan juga tergolong tinggi, dengan tingkat kehadiran dan keterlibatan yang aktif selama kegiatan berlangsung. Interaksi antara instruktur dan peserta berjalan cukup efektif, terutama dalam kegiatan praktik yang memungkinkan peserta untuk langsung mendapatkan pengalaman belajar secara aplikatif.

Namun demikian, ditemukan kendala pada penggunaan sistem pendaftaran digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh peserta. Selain itu, belum adanya pendampingan lanjutan setelah pelatihan selesai menjadi salah satu kelemahan dalam kesinambungan program, sehingga manfaat pelatihan belum sepenuhnya dapat dioptimalkan oleh peserta dalam jangka panjang.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Keterampilan Pemuda di Kota Samarinda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Faktor pertama adalah penyesuaian kapasitas pelaksanaan program akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini menyebabkan adanya pembatasan jumlah kelas pelatihan dan kuota peserta yang dapat diakomodasi. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tingginya minat pemuda di Kota Samarinda untuk mengikuti pelatihan dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam menyediakan layanan secara optimal.

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya responsivitas dan koordinasi antar pihak pelaksana program. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ketidaksiapan dari sebagian pemerintah kecamatan terkait jadwal dan lokasi kegiatan. Selain itu, terdapat kendala komunikasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah kecamatan, khususnya dalam penentuan topik pelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor dalam pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal sehingga berdampak pada kurang optimalnya implementasi di lapangan.

Faktor ketiga adalah minimnya monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan setelah kegiatan pelatihan selesai. Keterlibatan pemerintah kecamatan dalam pemantauan pasca pelatihan masih terbatas, dan belum terdapat arahan tindak lanjut yang sistematis dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menyebabkan tindak lanjut terhadap hasil pelatihan peserta belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor keempat adalah tidak adanya sistem pendampingan berkelanjutan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Peserta tidak memperoleh pendampingan formal dari penyelenggara sehingga penerapan keterampilan yang telah diperoleh

lebih banyak bergantung pada inisiatif individu masing-masing. Meskipun terdapat komunikasi informal melalui media seperti grup WhatsApp, hal tersebut belum mampu menggantikan fungsi pendampingan resmi. Dengan demikian, ketiadaan sistem pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi manfaat program bagi peserta.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan keterampilan pemuda di Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat terlihat dari relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pemuda, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana tercermin dari dukungan pelaksana dan mitra kerja dalam penyelenggaraan kegiatan, serta kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana ditunjukkan melalui mekanisme dan persyaratan program yang dapat dipahami dan diikuti oleh peserta. Kendala minor, seperti penggunaan sistem pendaftaran digital, masih ditemui. Secara umum, pelatihan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri pemuda untuk menghadapi dunia kerja maupun merintis usaha.
2. Faktor penghambat implementasi program meliputi penyesuaian kapasitas pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran, rendahnya responsivitas dan koordinasi antar pihak pelaksana, minimnya monitoring dan evaluasi pasca pelatihan, serta ketiadaan sistem pendampingan berkelanjutan bagi peserta. Faktor-faktor ini membatasi jangkauan program dan mengurangi keberlanjutan dampak pelatihan terhadap pengembangan keterampilan peserta, sehingga diperlukan perbaikan dalam kapasitas, koordinasi, monitoring, dan pendampingan agar manfaat program dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, program ini tetap memiliki kontribusi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda di Kota Samarinda, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar dampaknya lebih berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Pelatihan Kecakapan Hidup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, perlu meningkatkan kapasitas pelaksanaan program melalui optimalisasi

- perencanaan, evaluasi kriteria usia sesuai regulasi, serta penentuan sasaran wilayah prioritas berdasarkan kebutuhan pemuda. Selain itu, pembagian kuota peserta perlu lebih proporsional, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pascapelatihan (mentoring, pelatihan lanjutan, dan akses peluang kerja/usaha) agar dampak program lebih berkelanjutan.
2. Bagi mitra kerja organisasi pelaksana (*event organizer* dan pemerintah kecamatan), diperlukan peningkatan koordinasi dan responsivitas dalam pelaksanaan program, termasuk kesiapan jadwal dan fasilitas. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan pelatihan sebagai acuan teknis agar kegiatan lebih terstandarisasi, efektif, dan terkoordinasi dengan baik.
 3. Bagi peserta/pemuda, diharapkan dapat memanfaatkan hasil pelatihan secara optimal serta meningkatkan inisiatif dalam mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek keberlanjutan program (*sustainability*) atau dampak jangka panjang pelatihan terhadap kemandirian pemuda.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model, dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1, 1–19.
https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya
- BPS. (2025). *Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
<https://kaltim.bps.go.id/id/statisticstable/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyM2NDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-provinsikalimantan-timur.html>
- BPS. (2023). *Jumlah Pengangguran (Perkotaan + Perdesaan) menurut Kelompok Umur*, 2022.
<https://samarindakota.bps.go.id/id/statisticstable/2/NzExIzI%3D/jumlah-pengangguran-perkotaan-perdesaan-menurutkelompok-umur>
- Dunn, W. N. (2007). *Public Policy Analysis: An Introduction* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Gava Media.
- Mawardi, I. (2012). *Pendidikan Life Skills Berbasis Budaya Nilai-nilai Islami dalam Pembelajaran*. 4.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Nuraeni, S., Rachmawati, I., & Nur, T. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Program Sembako di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Professional*, 9(1), 143 – 148.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2559>
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi program electronic traffic law enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 205.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8191>
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, serta Asas*. Falah Production.
- Winarno, B. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- World Health Organization. (2024). *Adolescent health*.
<https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>